

POLITIK PEMERINTAHAN BANTEN DALAM TINJAUAN FILSAFAT SEJARAH SPEKULATIF

Oleh

Tubagus Damanhuri¹, Gede Agus Siswadi²

Universitas Gadjah Mada

e-mail: tubagusdamanhuri@mail.ugm.ac.id¹, gede.agus.siswadi@mail.ugm.ac.id²

ABSTRACT

This paper aims to examine the general patterns that occurred in the dynamics of the political history of Banten's government from the sultanate era, post-sultanate, to its establishment as a province as the material object of this discussion. The formal object is the philosophy of speculative history by borrowing the theory of patronage-clientelism and dynastic politics. This article uses a qualitative/literary research method with elements of the historical continuity method which is then analysed critically-reflectively by the author and presented descriptively. The results of the discussion found the thesis of the existence of a cyclical pattern that moves backwards in the political history of Banten's government and the existence of patronage and political dynasties as historical driving factors that have a great influence on sultanate/government politics that determine the progress and decline of Banten. This thesis is strengthened by several arguments: First, that patronage-clientelism through a review of individual-group relations in Banten's history proves that the figure of the sultan and his loyalists had a major influence in determining the glory and collapse of the Banten sultanate. Secondly, after the collapse of the sultanate until the establishment of Banten as a province, Banten lost a patron/political figure who was able to lead the Banten government with the spirit of the value of kebabantenan/marwah that was once respected by the nations of the archipelago because only the romanticism of a glorious history remained. Third, since Banten separated into its own province in 2000 until now it has been greatly influenced by dynastic politics/familism in the typology of octopussy dynasties because those involved in this dynasty are not only direct blood relations but also other extended families (relatives) which has caused the political dynasty to take root and spread in Banten, but has no significant influence on the welfare and prosperity of the Banten people.

Keywords: *political history, banten government, speculative philosophy*

I. PENDAHULUAN

Melihat sejarah politik pemerintahan Banten, penulis mencoba menelaah melalui perspektif filsafat sejarah spekulatif. Istilah filsafat sejarah spekulatif menunjuk pada rangkaian peristiwa-peristiwa masa lalu sebagai suatu realitas khusus yang menjadi perhatian bagi penyelidikan filosofis untuk diteliti. Tujuannya adalah untuk menemukan pola-pola makna umum yang ada di balik setiap pandangan sejarawan tentang peristiwa-peristiwa masa lampau (Dray, 1993: 1-5).

Ketika berbicara tentang pola gerak sejarah (sejarah itu berputar seperti roda/siklus, lurus seperti garis/linier, bergerak seperti spiral); motor penggerak sejarah (Tuhan, manusia, ide-ide, lingkungan, dan sebagainya), maka sejarah sementara dibicarakan dalam kerangka kerja spekulatif. Mengutip Ankersmit (1987) dalam buku "Refleksi tentang Sejarah" menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga permasalahan pokok yang perlu diselesaikan dalam filsafat sejarah spekulatif, yakni: (1) irama atau pola seperti apa yang dapat dikaji

dalam proses sejarah? (2) faktor penggerak apa yang memunculkan proses sejarah? dan (3) apa tujuan akhir dari proses sejarah?

Oleh karena itu, tulisan ini hendak menelaah pola-pola umum yang terjadi dalam dinamika sejarah politik pemerintahan Banten sejak era kesultanan, pasca kesultanan, hingga berdiri sebagai Provinsi sebagai objek material dalam pembahasan ini. Adapun sebagai objek formalnya ialah filsafat sejarah spekulatif dengan meminjam teori Patronase-Klientelisme dan politik dinasti. Makalah ini menarik diteliti untuk menguji tesis bahwa adanya pola siklus yang bergerak mundur pada sejarah politik pemerintahan Banten dan adanya Patronase dan dinasti politik menjadi faktor penggerak sejarah yang memiliki pengaruh besar atas politik kesultanan/pemerintahan yang menentukan maju dan mundurnya Banten.

II. PEMBAHASAN

2.1 Patronase-Klientelisme dan Politik Dinasti/Familism

Penulis mencoba menelaah pola sejarah politik pemerintahan Banten dengan teori Patronase-Klientelisme dan politik dinasti. Penggunaan Patronase dan Klientelisme relatif sering kali dipertukarkan bahkan disamakan, tanpa melihat dimensi di antara keduanya. Di antara ahli yang menggabungkan terminologi tersebut adalah Carl H. Lande (1977) yang kemudian mengungkapkan bahwa:

“A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e., an alliance between two persons of unequal status, in which the superior is usually a family and the inferior is such an alliance is called a patron. The inferior is called his client”.

Dalam perkembangannya, kedua terminologi tersebut dapat dipandang secara terpisah kendati tetap bertalian satu sama

lainnya. Pandangan demikian diungkapkan oleh Alex Weingrod (1968) yang menggarisbawahi bahwa penggunaan istilah Klientelisme mulai ketika beberapa ilmuwan politik menjelaskan sebuah pola baru Patronase yang lebih menonjolkan peran sosok partai politik dibandingkan sosok orang kuat (strong man) hingga dapat memobilisasi masa. Fenomena tersebut kemudian dikenal dengan istilah clientele atau political party directed patronage (Hanif, 2009: 328). Sementara istilah patron berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh (Usman, 2004: 132).

Sedangkan Klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang di dalamnya mengandung elemen teras, status inequality dan resiprokal. Lebih dari itu, Klientelisme juga dapat disebut sebagai relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas, hierarkis dan teras (Tomsa, 2014). Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa Klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara di mana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut. Dalam kajian politik, Klientelisme diartikan sebagai jaringan yang dikuasai patron untuk mengintervensi kliennya (Aspinall dan Sukmajati, 2015).

Untuk menganalisis adanya dan bertahannya dinasti politik di Banten, makalah ini menggunakan tipologi rezim dinasti politik di Indonesia yang dijabarkan oleh Djati (2013). Dengan mengutip pendapat Garzion (2002), Djati (2013) menyebutkan bahwa familisme adalah budaya politik dengan ketergantungan yang terlalu besar terhadap ikatan keluarga yang kemudian melahirkan kebiasaan untuk menempatkan keluarga atau yang memiliki ikatan kekerabatan pada kedudukan yang tinggi. Familisme dapat diartikan sebagai dorongan psikologis seseorang untuk bisa berkarir di dua ranah, yaitu di ranah publik

sebagai birokrat dan ranah privat selaku korporat-swasta. Dalam melihat kasus di Indonesia, Djati (2013) membuat empat tipologi rezim dinasti politik di Indonesia, yaitu familisme yang berbasis populism dynasties, octiopussy dynasties, tribalism dynasties dan feudalisme dynasties

Sejalan dengan Djati (2013), artikel ini memasukkan dinasti politik di Banten ke dalam bentuk tipologi kedua, yaitu octiopussy dynasties dikarenakan yang terlibat dalam dinasti ini tidak hanya hubungan darah langsung tetapi juga keluarga besar lainnya (kerabat) yang menyebabkan dinasti politik tersebut mengakar dan tersebar di Banten (Sukri, 2020: 174-175).

2.2 Patronase Politik di era Kesultanan Banten

Pienulis mienemukan rialitas histioris bahwa era kesultanan Banten mienandai adanya polarisasi politik yang lebih mieniekankan sosok/patrion Sultan yang menentukan maju-mundurnya gerak sejarah Banten masa itu. Pada masa lahirnya kesultanan Banten, patrion yang kuat dan memiliki pengaruh besar adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang dibaiaat sebagai Sultan piertama Banten.

Sultan Hasanuddin mielanjutkan priestasi Fatahillah yang bierhasil mienguasai Banten dan bierhasil mienguasai Sunda Kielapa pada tahun 1527. Fatahillah dinilai mampu mienyiebarkan agama Islam pada masyarakat Banten dan hal tersebut juga dilanjutkan Hasanuddin yang sejak 1552 miemiegang iestafiet kiekuasaan Banten.

Maulana Hasanuddin bierhasil miengajak banyak tiokioh pienganut agama Hindu (Brahmana) untuk miemieluk agama Islam yang ditandai dengan dibangunnya masjid piertama di Banten. Kiebierhasilan Maulana Hasanuddin di bidang politik memiliki pengaruh besar dalam menjadikan Banten sebagai satu kesultanan yang bierdaulat, terpisah dari kesultanan Diemak sejak tahun 1568. Dengan demikian, Maulana Hasanuddin menjadi Sultan Banten piertama.

Mienurut Sieioriotio (1961), di bawah pemerintahan Maulana Hasanuddin, Banten kemudian menjadi bandar tierbesar di sieluruh Nusantara. Bahkan menjadi pusran ekonomi bagi pierdagangan intiernasiional yang banyak miembierikan kieuntungan matieril untuk piembangunan dan kiesiejahteraan masyarakat Banten. Masa kesultanan Maulana Hasanuddin bierlangsung sielama 18 tahun hingga wafatnya pada tahun 1570. Pemerintahannya dapat dikatakan sebagai masa pemerintahan yang biersih (gioiod gioviernancie) yang jauh dari tindak kiorupsi yang mampu miembawa Banten pada puncak kiejayaannya.

Patronase politik dilanjutkan oleh Sultan Maulana Yusuf menjadi Sultan Banten kiedua (1570-1580 M), sietielah mienggantikan Sultan Maulana Hasanuddin. Bieliau miempierluas wilayah kiekuasaan Kesultanan Banten sampai jauh kie piedalaman yang siebielumnya masih dikuasai Kerajaan Sunda dan bierhasil mienduduki Ibukiota Kerajaan Sunda di Pakuwan. Maulana Yusuf miempierluas bangunan Masjid Agung Banten dengan miembuat serambi dan juga tielah miendirikan sebuah masjid lain di Kasunyatan (sielatan Banten Lama), yang dikienal dengan Masjid Kasunyatan (Sulaiman dan Ridwan, 2019:6).

Maulana Yusuf sangat tierkienal dengan upayanya miembangun jaringan irigasi yang sangat bierguna bagi piengiembangan piertanian, tierutama di daerah Banten bagian utara. Dengan demikian, Banten memiliki tiga sumbier dana piembangunan dalam upaya pieningkatan kiesiejahteraan rakyatnya, yaitu pielayaran, pierdagangan, dan piertanian. Maulana Yusuf mielanjutkan piengiembangan wilayahnya, mielalui pienietrasi agama Islam kie arah sielatan yang secara pierlahan mieruntuhkan kiekuatan Pajajaran. Hingga pada 1579, Kerajaan Pajajaran runtuh. Pienulis melihat kieruntuhan Pajajaran ini siejalan dengan apa yang dikatakan oleh Arniold Tioynbieie (1946) dalam "A Study iof Histiory" bahwa

peradaban besar tidaklah dibunuh. Mierieka miencabut nyawanya siendiri.

Patronase politik dilanjutkan pada sosok Sultan Abulmafakir. Waktu diniobatkan menjadi Sultan Banten, Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir masih bierusia lima bulan, siehingga jalannya pemerintahan ditangani oleh suatu diewan wali. Salah sieorang dari antara diewan wali tersebut adalah Pangeran Arya Ranamanggala, paman sultan, yang mienduduki jabatan sebagai Mangkubumi. Dalam sejarah Kesultanan Banten, Ranamanggala sangat tierkienal karena sikapnya yang dengan keras mieniolak masuknya pengaruh ViOC kie Banten. Dengan gigihnya Ranamanggala bierupaya miempiertahankan kiedaulatan Banten sambil tetap menjadikan Banten sebagai bandar intiernasiional yang ramai dikunjungi oleh piedagang-piedagang dari kawasan Asia maupun iEriopa (Kamarga, 2019).

Sementara itu, kiemajuan Banten ini tientu saja mienyiebakkan ViOC yang tielah miempunyai kiedudukan di Batavia merasa iri. Kieinginan ViOC untuk mieniegakkan mioniopioliunya mienghadapi politik Banten dengan siegala daya bierupaya miempiertahankan kiedaulatannya, tiermasuk mieliputi biekas wilayahnya, yaitu Jayakarta, yang dalam tahun 1619 diriebut oleh ViOC dan diubah menjadi Batavia. Batavia mierupakan lambang kiolionalismie, siedangkan Banten adalah lambang kiedaulatan. Sampai saat itu, ViOC bielum berani secara terang-terangan miembuka friont tierhadap Banten (Kamarga, 2019).

Hadirnya era kiejayaan Banten tidaklah tierlepas dari Patronase sosok sultan Agieng Tirtayasa. Di bawah pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, Banten miencapai puncak kiejayaannya. Tientu saja priestasi ini tidak akan piernah dicapai tanpa kiebierhasilan para sultan piendahulunya sierta kiemampuan dan kiearifan yang dimiliki Sultan Agieng Tirtayasa untuk mielanjutkan dan mieningkatkan kiebierhasilan-

kiebierhasilan yang tielah dicapai oleh para piendahulunya. Kiemakmuran dan kiesiejahteraan Banten yang sejak awal pierkiembangannya dilietakkan di atas kiepiawaian pielayaran dan pierdagangan sierta kiemahiran miengiembangkan piertanian, tierus ditingkatkan. Tanah yang subur lagi luas, lautan tierbuka, dan kieulietan rakyatnya, mierupakan faktor-faktor yang biersiniergis untuk miencapai kiemajuan dan kiemakmuran Banten (Kamarga, 2019).

Hasil besar yang patut dibanggakan pada masa pemerintahan Sultan Agieng Tirtayasa di bidang pielayaran dan pierdagangan, ialah tierciptanya jaringan pielayaran dan pierdagangan yang teratur dengan daerah sieberang lautan. Dengan sienang hati Sultan Agieng Tirtayasa miengizinkan orang-orang Inggris, Dienmark, dan Perancis mielakukan kiegiatan pierdagangan di Banten. Kieahlian para piedagang dan pielaut dari iEriopa ini dimanfaatkan oleh Sultan Agieng Tirtayasa untuk miembangun armada niaganya. Bahkan para nakhoda orang-orang iEriopa itu pulalah yang pada mulanya miemimpin kapal-kapal Banten dalam pielayarannya kie Philippina, Macaio, Bienggala dan Piersia (Vliekkie, 1961:176-177).

Dalam jaringan pierdagangan intiernasiional, Banten menjadi pielabuhan transit bagi barang-barang kiomioditas intiernasiional, dan tiempat biertiemunya para piedagang dari bierbagai pienjuru. R. Mioh. Ali (1963:112) mienyiebutkan bahwa piedagang-piedagang dari Cina, Piersia, dan India yang miembawa kiomioditas dari niegierinya masing-masing, ikut meramaikan pierdagangan di Banten pada waktu itu.

Prinsip pielayaran dan pierdagangan biebas yang dilietakkan di atas piengakuan kiedaulatan Banten ini, tientu saja tidak dapat didamaikan dengan prinsip mioniopioli yang dipaksakan oleh ViOC yang tielah bierkiedudukan di Batavia, kiota yang siebielumnya tielah menjadi bagian Banten sejak Fatahillah mienguasai dan mienamanya Jayakarta. Sielain

meningkatkan armada niaga, Sultan Agieng Tirtayasa juga terus meningkatkan kemampuan armada tiempur dan kiekuatan pasukan daratnya. Untuk itu, Sultan Agieng Tirtayasa miemanfaatkan bantuan pedagang-pedagang Inggris dan Denmark bierupa sienjata api, dan pielaut-pielaut yang mielayannya sebagai pienimbak-pieniembak (gunniers) sierta ahli-ahli miesin (ienginieiers) (Vliekkie, 1961:180). Tjandrasmita (1965:5) miungkapkan bahwa di siekitar tahun 1660, Sultan Agieng Tirtayasa miembangun pierkampung-pierkampung besar yang diliengkapi dengan bientieng-bientieng di daerah Angkie-Tangerang untuk miemudahkan serangan-serangan Banten tierhadap Batavia liewat darat.

Pada piermulaan kieruntuhan Banten, hal ini tidak tierlepas dari sosok Sultan Haji yang saat itu tierhasut oleh politik piecah-bielah dari Bielanda akan kiekhawatiran peralihan tahta kerajaan. Pada tahun 1671, Sultan Agieng Tirtayasa miangkat putera mahkiota, Abdulkahar, menjadi Raja Muda. Dengan piangkatan Raja Muda ini, Sultan Agieng Tirtayasa biermaksud mienitikberatkan pierhatiannya tierhadap masalah-masalah luar niegieri sierta pierluasan pengaruh Banten, siedangkan urusan dalam niegieri Banten diserahkan kiepada Abdulkahar. Sultan Agieng Tirtayasa siendiri kemudian pindah kie istananya yang baru di Tirtayasa, siedangkan Abdulkahar tetap bierkiedudukan di istana Surasiowan. Piembagian kiekuasaan ini dimanfaatkan ViOC miciptakan dan mienyebarkan bierita biohiong untuk miempengaruhi Sultan Haji.

Inti bierita biohiong yang disebarkan oleh ViOC itu ialah bahwa Sultan Agieng Tirtayasa dengan siengaja miendioriong dan mierenankan kieberangkatan Sultan Haji kie Miekah agar ada kiesempatan untuk miempersiapkan puteranya yang lain, adik Sultan Haji yaitu Pangeran Purbaya, sebagai Sultan Banten. Kiekhawatiran Sultan Haji akan kiehilangan tahtanya, mienyebabkannya mieniempuh jalan yang

kieliru. Sultan Haji mieminta bantuan kiepada ViOC. Kiekieliruan Sultan Haji ini miencapai puncaknya dengan mielakukan pieriebutan kiekuasaan di Banten dengan miurunkan ayahnya dalam tahun 1681. Sultan Agieng Tirtayasa pun tertawan oleh Bielanda dan diasingkan kie Batavia dan wafat dalam pienjara ViOC pada tahun 1692, dan jienazahnya dimakamkan di Banten.

Akibat dari pieristiwa tersebut, kiekuatan pemerintahan Banten tierpiecah dua. Upaya Sultan Agieng Tirtayasa untuk mienghukum Sultan Haji gagal karena Sultan Haji diindungi oleh pasukan ViOC yang terus biertambah. Sambil mienghimpun kiembali kiekuatan, Sultan Agieng Tirtayasa biesierta para piengikutnya kiembali kie bientieng Tirtayasa, namun bientieng ini pun tidak luput dari ancaman dan serangan pasukan ViOC yang secara tieknis militier miemang lebih unggul. Sietielah mielakukan siasat bumi hangus atas bientieng dan istana Tirtayasa, Sultan Agieng Tirtayasa biesierta Pangeran Purbaya mienyingkir kie arah Sielatan, kie daerah Liebak. Di antara lioyalis Sultan Agieng Tirtayasa yang dengan tabah terus mielakukan pierlawanan tierhadap ViOC adalah Syiekh Yusuf, sieorang tiokioh agama Islam yang oleh masyarakat dikienal sebagai orang salieh.

Sejak berakhirnya pierjuangan Sultan Agung Tirtayasa, Syiekh Yusuf, dan Pangeran Purbaya biesierta para lioyalis sietianya, hampir tidak ada lagi pierjuangan yang berarti untuk miempertahankan tiegaknya kiedaulatan Banten. Pengaruh ViOC tidak dapat dibiendung lagi. Banten yang jaya tinggal kienangan, tinggal sejarah. Para pienguasanya hanya bierperan sebagai bionieka yang tunduk kiepada kiekuasaan asing (Kamarga, 2019).

2.3 Banten Pasca Kesultanan: Kiolionialismie Bielanda dan Pemerintahan Indionesia

Pada tahun 1816 M, Gubiernur Van Dier Capiellien sebagai utusan dari Bielanda dan miengambil alih kiekuasaan dari tangan Sultan Muhammad Shafiuddin.

Bielanda wilayah kekuasaan kerajaan dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Serang, Lebak dan Caringin. Maka dengan ini berakhirlah masa Kesultanan di Banten (Sulaiman dan Ridwan, 2019: 9). Dan sietielah dihapuskannya kesultanan Banten, wilayah Banten menjadi bagian dari kawasan kolonialisasi. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tahun 1817, Banten dijadikan klerisiedienan, dan sejak tahun 1926 wilayah Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Bahkan di bawah biendera rievolutusi kiemierdiekaan Riepublik Indioniesia tahun 1945, Banten pun masih berada di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut mieniegaskan bahwa ada suatu rientang sejarah yang mienandai miemudarnya kiekuatan politik Banten hingga kemudian nuansa riomantisismie hadir dalam sebuah spirit inspirasi masyarakat Banten akan kiejayaan Banten dengan mienghendaki adanya satu kawasan iotioniomi di bawah siemangat rieformasi pemerintahan Indioniesia dengan miendioriong wilayah Banten menjadi Provinsi Banten mielalui UU Nio. 23 Tahun 2000.

2.4 Dinasti Politik Pemerintahan Provinsi Banten

Penulis menemukan realitas historis bahwa sejak Banten berdiri sebagai pemerintahan Provinsi pada tahun 2003 tidak terlepas dari kekuatan politik dinasti yang lahir dari Patronase Tubagus Chasan Sochib sebagai *Local Strongman* yang merupakan ayah dari Ratu Atut. Sejak memasuki masa reformasi, Chasan Sochib telah menguasai arena politik, sosial, dan budaya di Banten yang telah dirintisnya sejak 1967. Chasan Sochib menjadi salah satu tokoh yang berpn dalam mendorong pemekaran dengan terbentuknya Provinsi Banten. Ia juga memberikan bantuan finansial sehingga ia menjadi tokoh pembentukan Provinsi Banten. Chasan Sochib secara aktif menentukan siapa yang menjadi penguasa di Banten. Dimulai dengan berhasilnya Ratut Atut (anaknya) menjadi wakil gubernur Banten, kemudian

mncang keluarga besarnya untuk terlibat aktif di bidang politik, sosial, dan budaya (P2D, 2011 dalam Sukri, 2020).

Pada 2013, Ratu Atut dan adiknya Tubagus Chairil Wardana alias Wawan ditangkap KPK atas kasus suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, tentang perkara sengketa Pemilihan Kepala Dah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan korupsi pengadaan sarana-prasarana alat-alat kesehatan dan pengadaan barang lainnya di Provinsi Banten dari tahun 2011 sampai 2013. Dengan ditangkapnya Ratu Atut dan Wawan, para pengamat politik mmalkan dinasti politik di Banten akan menuju kehancuran. Burhanudin Muhtadi, misalnya, mengatakan tertangkapnya Atut sebagai 'Ratu' dan Wawan sebagai 'Raja' dalam dinasti politik membuat dinasti politik keluarga Atut di Banten tinggal menunggu kehancuran.

Namun, pada kenyataannya, dipenjaranya Atut dan adiknya atas kasus korupsi tersebut tidak berpengaruh terhadap kemenangan keluarganya pada Pilkada serentak Banten 2015. Keluarga Atut menang pada Pilkada Banten 2015, Pilgub 2017 dan hanya kalah di Pilkada 2018. Keluarga Atut yang menang pada Pilkada Banten 2015 adalah Airin Rachmi Diany (adik ipar Atut) yang berpasangan dengan Benyamin Davnie di Kota Tangng Selatan, Tanto Warsono (menantu Atut) yang menjadi wakil bagi Irna Narulita di Kabupaten Pandeglang,

Pienulis mieniemukan riealitas historis bahwa sejak Banten berdiri sebagai pemerintahan Provinsi pada tahun 2003 tidak tierlepas dari kiekuatan politik dinasti yang lahir dari Patronase Tubagus Chasan Siochib sebagai Liocal Striongman yang mierupakan ayah dari Ratu Atut. Sejak miemasuki masa rieformasi, Chasan Siochib tielah mienguasai ariena politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Banten yang tielah dirintisnya sejak 1967. Chasan Siochib menjadi salah satu tiokioh yang bierperan dalam miendioriong piemiekaran dengan tierbientuknya Provinsi Banten. Ia

juga memberikan bantuan finansial sehingga ia menjadi tokoh pembentukan Provinsi Banten. Chasan Siochib secara aktif menentukan siapa yang menjadi penguasa di Banten. Dimulai dengan berhasilnya Ratut Atut (anaknya) menjadi wakil gubernur Banten, kemudian merancang keluarga besarnya untuk terlibat aktif di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya (P2D, 2011 dalam Sukri, 2020).

Pada 2013, Ratu Atut dan adiknya Tubagus Chairil Wardana alias Wawan ditangkap oleh KPK atas kasus suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, tentang perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Liebak, Provinsi Banten, dan korupsi pengadaan sarana-prasarana alat-alat kesehatan dan pengadaan barang lainnya di Provinsi Banten dari tahun 2011 sampai 2013. Dengan ditangkapnya Ratu Atut dan Wawan, para pengamat politik meramalkan dinasti politik di Banten akan menuju kehancuran. Burhanudin Muhtadi, misalnya, mengatakan tertangkapnya Atut sebagai 'Ratu' dan Wawan sebagai 'Raja' dalam dinasti politik membuat dinasti politik keluarga Atut di Banten tinggal menunggu kehancuran.

Namun, pada kenyataannya, dipenjaranya Atut dan adiknya atas kasus korupsi tersebut tidak berpengaruh terhadap kemenangan keluarganya pada Pilkada serentak Banten 2015. Keluarga Atut menang pada Pilkada Banten 2015, Pilgub 2017 dan hanya kalah di Pilkada 2018. Keluarga Atut yang menang pada Pilkada Banten 2015 adalah Airin Rachmi Diany (adik ipar Atut) yang berpasangan dengan Biyamin Davnie di Kota Tangerang Selatan, Tantio Warsionio (menantu Atut) yang menjadi wakil bagi Irna Narulita di Kabupaten Pandeglang, dan Ratu Tatu Chasanah (adik Atut) yang berpasangan dengan Pandji Tirtayasa di Kabupaten Serang. Dari empat wilayah yang ikut dalam pilkada serentak di

Banten, tiga di antaranya dimenangkan oleh keluarga Ratu Atut. Keluarga Atut kembali menang dalam Pilgub 2017 dengan naiknya anak Atut, yaitu Andika Hazrumy sebagai Wakil Gubernur Banten berpasangan dengan Wahidin Halim. Hanya pada Pilkada 2018 di Kota Serang keluarga Atut mengalami kekalahan; Vera Nurlaela Jaman yang merupakan istri dari adik tiri Atut gagal menjadi walikota. Kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh keluarga Atut tersebut memperlihatkan bahwa ramalan bahwa dinasti politik keluarga Atut akan hancur setelah ditangkapnya Ratu Atut oleh KPK tidak terbukti (Sukri, 2020).

Walaupun anggota keluarga lainnya terkena pidana korupsi, bentuk dinasti yang menggurita dengan penguasaan bidang politik, organisasi masyarakat, sosial dan ekonomi yang kuat menyebabkan dinasti politik keluarga Atut masih bertahan. Jejaring yang dimiliki oleh keluarga ini di Partai Golkar mempermudah keluarga Atut untuk mencalonkan diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah. Selain itu, bertahannya dinasti politik ini dan meraih kemenangan berkaitan dengan strategi politik yang digunakan mulai dari pemilihan pasangan calon, marketing politik, count down isu dinasti politik, dan penggunaan media sosial sebagai alat kemenangan. Strategi yang baik sangat membantu dalam mempertahankan dinasti politik tersebut (Sukri, 2020). Di samping itu, sejak Pilkada 2015 hingga saat ini, partisipasi politik masyarakat Banten tergolong rendah, tidak mencapai angka 70 persen atau tidak sesuai dengan target KPU. Partisipasi yang rendah tentunya akan berdampak pada kualitas demokrasi.

III. SIMPULAN

Dari gerak sejarah politik pemerintahan Banten yang telah penulis jelaskan di atas, kita dapat menemukan adanya pola siklus yang ditandai kejayaan Banten pada era Sultan Ageng Tirtayasa namun berangsur redup hingga keruntuhan

kesultanan, pasca kesultanan di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan Indonesia, bahkan hingga adanya Pemerintahan Provinsi Banten sejak 2000 hingga dewasa ini. Sejak masa kejayaan itu, Banten tidak pernah bangkit kembali pada kejayaannya.

Gerak sejarah secara kronologis tersebut menggambarkan lahirnya kesultanan Banten pada masa Maulana Hasanuddin, kemudian berkembang di bawah kepemimpinan Maulana Yusuf dan Abulmafakhir, dan di bawah tahta Sultan Ageng Tirtayasa membawa Banten menuju puncak kejayaannya. Sejak konflik berdarah dan akuisisi Sultan Haji yang berafiliasi dengan Belanda membuat kekuatan Banten terpecah-belah hingga pada akhirnya menjadi aneksasi kekuatan politik Belanda. Kesultanan Banten pun berakhir pada masa Sultan Muhammad Shafiuddin atas titah pemerintahan kolonial Belanda. Pasca berakhirnya kesultanan, Banten telah kehilangan spirit dan marwah politiknya di tengah-tengah bangsa Nusantara. Banten hanya tenggelam dalam romantisme kejayaannya.

Penulis juga menemukan bahwa motor penggerak sejarah politik Banten tidak terlepas dari adanya patron-patron Sultan yang memiliki pengaruh besar, seperti Sultan Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Abulmafakhir, dan Sultan Ageng Tirtayasa. Di sisi lain, sejak masa Sultan Haji, Banten seakan mewarisi budaya feodalistik-birokratis dari Belanda. Sebab, sultan-sultan setelah itu hanyalah aneksasi dari pemerintahan kolonial Belanda yang cenderung berkompromi terhadap relasi kuasa atau dalam bahasa lain mencari jalan “politik aman” untuk melanggengkan hegemoni kuasa. Warisan budaya politik tersebut terlihat jelas dalam wajah baru dinasti politik yang hadir di masa pemerintahan Provinsi Banten pasca reformasi Indonesia.

Dinasti politik yang hadir pun tidak terlepas dari patron Chasan Sohib yang telah merintis relasi kuasanya dari berbagai aspek, seperti sosial, politik, ekonomi,

bahkan organisasi masyarakat hingga menjelma hegemoni kuasa. Chasan Sohib telah membangun dinasti politik yang sangat mengakar dan kokoh untuk mengatur kuasa di Banten bahkan hingga dewasa ini. Bahkan dengan ditangkapnya Ratu Atut dan kroninya atas kasus korupsi, tetap tidak memiliki pengaruh signifikan akan kekuasaan yang telah menggurita di Banten. Namun, kekuasaan atas basis dinasti politik di Banten bisa dikatakan hanya perihal kepentingan kekuasaan dan keluarganya semata. Dinasti politik ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan akan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan masih banyaknya ketertinggalan dari aspek kemiskinan, pengangguran, indeks kebahagiaan masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur yang tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintahan Provinsi Banten.

Oleh karena itu, penulis dapat menyatakan bahwa gerak sejarah Banten ke depan hanya akan menunda kematian atau bertahan dalam status quo “ketertinggalan” jika belum adanya kesadaran politik yang tinggi, baik dari patron-patron/figur politik ataupun masyarakat, dalam membangun Banten lebih baik sejak masa kekinian. Usaha-usaha reformatif dalam ranah birokrasi politik patut menjadi perhatian serius bagi masyarakat Banten. Praktik politik yang didasarkan atas kekuatan dinasti politik hanya akan membawa Banten menuju kemerosotan nilai kebantenan secara perlahan. Nilai kebantenan yang penulis maksud mendasarkan pada marwah/martabat Banten yang dahulu disegani bangsa-bangsa nusantara. Kekuatan politik dinasti di Banten harus segera ditinggalkan, karena jauh dari demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, R. Moh. 1954. *Perdjoangan Feodal Indonesia*. Bandung: Penerbit Ganaco N.V.

- Ankersmit, F.R. 1987. *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*. Terj. Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia.
- Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Bakker, Anton dan Charris Zubair, Achmad. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Djati, Wasisto Raharjo. 2013. *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*. FISIP UI: Jurnal Sosiologi Masyarakat. Vol. 18. No. 12.
- Dray, William H. 1993. *Philosophy of History*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Garzon, Adela. 2002. *Familism*. In *International Encyclopedia of Marriage and Family*. Ed. James J. Ponzetti. New York: MacMillan.
- Hanif, Hasrul. 2009. *Politik Klientelisme Baru dan Dilema Demokratisasi di Indonesia*. JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 12. No.3.
- Kamarga, Hansiswany. 2019. *Bercermin pada Sejarah Banten Tempo Dulu*. Artikel Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah UNY.
- Lande, Carl H. 1977. *Introduction: The Dyadic Bases of Clientelism*. In Schmidt, Guasti, Landé, and Scott (Eds), *Friends, Followers, and Factions: A Reader in Political Clientelism*. Berkeley: University of California Press.
- Ridwan, dkk. 2021. *Studi Kebantenan dalam Catatan Sejarah*. Tangerang: Media Edukasi Indonesia.
- Sukri, Mhd. Al Fahjri. 2020. *Dinasti Politik di Banten: familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat*. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 10. No. 2.
- Sulaiman, Fattah dan Ridwan, Asep. 2019. *Studi Kebantenan dalam Perspektif Budaya dan Teknologi*. Serang: Unitirta Press.
- Tjandrasasmita, Uka. 1965. *Adegan Sedjarah Sultan Ageng Tirtajasa (1651-1692)*.
- Tomsa, Dirk. 2014. *Party System Fragmentation in Indonesia: The Subnational Dimension*. Journal of East Asian Studies. Vol. 14. No. 2.
- Toynbee, Arnold J. 1946. *A Study of History*. US: Oxford University Press.
- Usman, Sunyoto. Sosiologi. 2004. *Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development.
- Vlekke, B.H.M. 1961. *Nusantara: A History of Indonesia*. Jakarta: Penerebit Soeroengan.
- Weingrod, Alex. 1968. *Patrons, Patronage, and Political Parties*. In *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 10. No. 4. Cambridge University Press.